

Drama TKI Ilegal

OLEH ENY HARYATI

MENJELANG Idul Fitri, fenomena tenaga kerja Indonesia ilegal mengemuka. Sebagian memanfaatkan, mereka "noda" bangsa. Namun, sebagian lain meyakini, mereka "korban" kegagalan penyelenggaraan pembangunan oleh negara. Dalam hitungan Pemerintah Malaysia, dari 1,2 juta tenaga kerja asing ilegal yang ada di sana, setidaknya 700.000 orang berasal dari Indonesia (*Kompas*, 27/10/2004).

Berbicara TKI ilegal bukan sekadar berbicara masalah yang "kasatmata", karena keberadaannya tidak tunggal dan parsial. Fenomena TKI ilegal hadir sebagai subsistem dari sistem lebih besar. Karena itu, penyelesaiannya memerlukan pisau solusi bersisi ganda.

Pisau solusi sisi pertama berorientasi kepada *problem solving* jangka pendek, berkaitan dengan proses pemulangan mereka, seiring amnesti yang diberikan Pemerintah Malaysia pada Idul Fitri tahun ini. Untuk itu, armada angkutan disiapkan dan pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp 140 miliar-Rp 200 miliar (*Kompas*, 29/10/2004).

PERTANYAANNYA, apakah masalah sosial TKI ilegal akan selesai saat mereka masing-masing sudah sampai di kampung halamannya? Jelas tidak! Untuk itu diperlukan solusi kedua.

Pisau solusi sisi kedua menitikberatkan upaya membedah sebab musabab mengapa sejumlah besar warga negara Indonesia nekat bekerja di mancanegara tanpa dokumen resmi. Bukankah itu melanggar konstitusi? Tidakkah itu berisiko tinggi? Bagaimana caranya agar persoalan yang sama tidak terjadi lagi? Kebijakan apa yang diperlukan untuk menghadapi masalah pengangguran baru

mantan TKI ilegal ini?

Setidaknya ada empat tesis utama yang diharapkan dapat menjawab sejumlah pertanyaan ini. Pertama, kasus TKI ilegal merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik calo tenaga kerja yang marak berkembang di negeri ini. Merekalah para spekulan yang memanfaatkan kondisi ketidaktahuan dan keterjepitan seseorang. Iming-iming yang diberikan adalah biaya lebih murah dibandingkan dengan yang dipungut perusahaan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia (PJTki) resmi. Selain itu, para calo aktif melakukan promosi (baca:provokasi) ke rumah-rumah pihak yang potensial menjadi target sasaran. Cara kerja mereka tidak saja bersifat promotif-provokatif, tetapi juga tergolong pembodohan dan penipuan, setidaknya yang dilakukan dengan memberi keterangan tidak lengkap tentang sistem ketenagakerjaan.

Dalam konstruksi sosial serba tertekan, di tengah pahitnya hidup oleh berbagai impitan kebutuhan, minimnya kepemilikan akan pengetahuan, dan tidak adanya harapan mendapat penghasilan layak di kampung halaman, tak heran jika tawaran calo menjadi efektif dalam membidik sasaran. Bermodal tekad untuk mengubah hidup dan penghidupan serta tergiur biaya keberangkatan murah yang dijanjikan calo, mereka berbondong-bondong menerima tawaran. Menjadi TKI ilegal pun akhirnya didaulat sebagai sebuah pilihan, sebagai pil pahit yang harus ditelan, dengan harapan menjadi obat penawar bagi penyakit kemiskinan yang telah lama mereka sandang.

KEDUA, secara darurat pemerintah perlu mengambil solusi terapi terhadap masalah yang timbul akibat arus kepulangan TKI ilegal. Mereka setidaknya terbagi ke dalam tiga kategori. Pertama, sebagian dari mereka ingin kembali ke Malaysia, dan kepulangan ini digunakan untuk melengkapi dokumen resmi. Kedua, mereka ada yang tidak ingin menjadi TKI lagi, namun dalam waktu dekat perlu penghasilan pengganti di negeri sendiri karena berkaitan dengan kebutuhan primer "hidup-mati". Ketiga, sebagian dari mereka ada yang perlu menenangkan hati sebelum mengambil langkah di esok hari.

Mantan TKI ilegal kategori

pertama memerlukan layanan administrasi, kategori kedua memerlukan solusi ekonomi berupa penyediaan lapangan pekerjaan, dan kategori ketiga memerlukan konsultasi psikologi. Belum terdengar rencana pemerintah untuk menangani tiga hal ini, terutama yang berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan darurat.

◆◆◆

KETIGA, derasnya arus keinginan angkatan kerja *unskill* untuk menjadi TKI didorong sejumlah alasan. Di antaranya karena menjadi TKI masih memberi harapan, pada saat yang sama di negeri sendiri tidak tersedia lapangan pekerjaan. Dalam kerangka ini, keseimbangan antara pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi/produksi (*production-centered development*) dan yang berpusat pada manusia (*people-centered development*) perlu diciptakan.

Pemberian porsi "over dosis" terhadap *production-centered development* oleh pemerintah di bawah kendali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada lima tahun ke depan dicemaskan Da-oed Joesoef (*Kompas*, 27/10/2004). Menurut dia, jangan sampai pemerintah kembali terjebak paradigma lama, yang menempatkan sektor ekonomi sebagai panglima, dan menganggap pertumbuhan ekonomi bak "dewa". Bahwa pertumbuhan ekonomi itu penting, tentu benar. Namun selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, energi pemerintah juga harus dituang untuk pembangunan yang berpusat pada manusia. Toh dalam pemerintahan Orde Baru "dewa" itu terbukti gagal membuktikan asumsinya tentang *trickle-down effect* dan gagal kemakmuran merata bagi rakyat Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi disebut tidak berpusat pada manusia jika berciri *jobless growth* (UNDP, 1996), yakni pertumbuhan ekonomi tidak disertai terciptanya lapangan pekerjaan dan penyelesaian masalah pengangguran. Justru sebaliknya, desakan industrialisasi terhadap lapangan pekerjaan (*displacement effect*) terjadi melalui mekanisme pamarjinalan dunia usaha lokal-tradisional oleh industrialisasi berbasis kapital (ILO, 1977).

Misalnya, pendirian pabrik sandal di Afrika Barat dengan dua mesin injeksi menghasilkan

3,5 juta pasang sandal per tahun, mempekerjakan 40 orang, dalam waktu singkat menggeser 5.000 perajin sandal yang melibatkan 60.000 tenaga kerja. Industri tekstil modern Indonesia tahun 1970-an menyerap 86.000 tenaga kerja, namun pada saat sama 410.000 pekerja tekstil tradisional (penenun, penjahit, pencelup) kehilangan lapangan pekerjaan (Strahm, 1999). Karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengandalkan pertumbuhan ekonomi sebagai pilar tunggal dalam menciptakan lapangan pekerjaan, kemakmuran, dan pemerataan. Atas dasar inilah, menyeimbangkan *production-centered development* dan *people-centered development* harus sungguh-sungguh dilakukan.

◆◆◆

KEEMPAT, pemulangan massal TKI ilegal dari Malaysia kali ini hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi kita, terutama bagi calo tenaga kerja, TKI sendiri, dan pemerintah. Harus disadari, ketika "jalan gelap" menjadi TKI ilegal dipilih, sebenarnya kita telah mempertaruhkan dua hal besar sekaligus. Pertama mempertaruhkan nasib dan keselamatan TKI ilegal sendiri, dan pada saat yang sama mempertaruhkan martabat bangsa.

Untuk direnungkan, apakah dua hal besar itu rela di-"barterkan" begitu saja dengan *devisa*? Jika "tidak", maka, pertama, praktik calo tenaga kerja yang ikut membidani lahirnya TKI ilegal harus diakhiri. Kedua, pemberian sanksi kepada calo dalam rangka "membasmi" praktik percaloan perlu jadi agenda bersama. Ketiga, calon TKI hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih perantara tenaga kerja. Keempat, pemerintah perlu meningkatkan efektivitas komunikasi-informasi pada publik soal bahaya praktik calo dan prosedur yang benar bekerja di luar negeri.

Penghentian "pentas drama" TKI ilegal tak boleh ditunda lagi agar tidak melahirkan babak berikut. Semua itu hanya mungkin terjadi jika seluruh "pemeran utama" mau menyadari, upaya mengais rezeki seharusnya seiring dengan upaya menjaga martabat bangsa.

ENY HARYATI
Dosen FIA-Unitomo, Staf Ahli
CLIENTS, Direktur Eksekutif
Center for Integrated Community
Learning and Empowerment
(CICLE)

Drama TKI Ilegal

Oleh: Eny Haryati

MENJELANG Idul Fitri, fenomena tenaga kerja Indonesia ilegal mengemuka. Sebagian memandang, mereka "noda" bangsa. Namun, sebagian lain meyakini, mereka "korban" kegagalan penyelenggaraan pembangunan oleh negara. Dalam hitungan Pemerintah Malaysia, dari 1,2 juta tenaga kerja asing ilegal yang ada di sana, setidaknya 700.000 orang berasal dari Indonesia (Kompas, 27/10/2004).

Berbicara TKI ilegal bukan sekadar berbicara masalah yang "kasatmata", karena keberadaannya tidak tunggal dan parsial. Fenomena TKI ilegal hadir sebagai subsistem dari sistem lebih besar. Karena itu, penyelesaiannya memerlukan pisau solusi bersisi ganda.

Pisau solusi sisi pertama berorientasi kepada problem solving jangka pendek, berkaitan dengan proses pemulangan mereka, seiring amnesti yang diberikan Pemerintah Malaysia pada Idul Fitri tahun ini. Untuk itu, armada angkutan disiapkan dan pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp 140 miliar-Rp 200 miliar (Kompas, 29/10/2004).

PERTANYAANNYA, apakah masalah sosial TKI ilegal akan selesai saat mereka masing-masing sudah sampai di kampung halamannya? Jelas tidak! Untuk itu diperlukan solusi kedua. Pisau solusi sisi kedua menitikberatkan upaya membedah sebab musabab mengapa sejumlah besar warga negara Indonesia nekat bekerja di mancanegara tanpa dokumen resmi. Bukankah itu melanggar konstitusi? Tidakkah itu berisiko tinggi? Bagaimana caranya agar persoalan yang sama tidak terjadi lagi? Kebijakan apa yang diperlukan untuk menghadapi masalah pengangguran baru mantan TKI ilegal ini? Setidaknya ada empat tesis utama yang diharapkan dapat menjawab sejumlah pertanyaan ini. Pertama, kasus TKI ilegal merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik calo tenaga kerja yang marak berkembang di negeri ini. Merekalah para spekulator yang memanfaatkan kondisi ketidaktahuan dan keterjepitan seseorang. Iming-iming yang diberikan adalah biaya lebih murah dibandingkan dengan yang dipungut perusahaan pengantar jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) resmi. Selain itu, para calo aktif melakukan promosi (baca:provokasi) ke rumah-rumah pihak yang potensial menjadi target sasaran. Cara kerja mereka tidak saja bersifat promotif-provokatif, tetapi juga tergolong pembodohan dan penipuan, setidaknya yang dilakukan dengan memberi keterangan tidak lengkap tentang sistem ketenagakerjaan.

Dalam konstruksi sosial serba tertekan, di tengah pahitnya hidup oleh berbagai impitan kebutuhan, minimnya kepemilikan akan pengetahuan, dan tidak adanya harapan mendapat penghasilan layak di kampung halaman, tak heran jika tawaran calo menjadi efektif dalam membidik sasaran. Bermotivasi untuk mengubah hidup dan penghidupan serta tergiur biaya keberangkatan murah yang dijanjikan calo, mereka berbondong-bondong menerima tawaran. Menjadi TKI ilegal pun akhirnya didaulat sebagai sebuah pilihan, sebagai pil pahit yang harus ditelan, dengan harapan menjadi obat penawar bagi penyakit kemiskinan yang telah lama mereka sandang.

KEDUA, secara darurat pemerintah perlu mengambil solusi terapi terhadap masalah yang timbul akibat arus kepulangan TKI ilegal. Mereka setidaknya terbagi ke dalam tiga kategori. Pertama, sebagian dari mereka ingin kembali ke Malaysia, dan kepulangan ini digunakan untuk melengkapi dokumen resmi. Kedua, mereka ada yang tidak ingin menjadi TKI lagi, namun dalam waktu dekat perlu penghasilan pengganti di negeri sendiri karena berkaitan dengan kebutuhan primer "hidup-mati". Ketiga, sebagian dari mereka ada yang perlu menenangkan hati sebelum mengambil langkah di esok hari.

Mantan TKI ilegal kategori pertama memerlukan layanan administrasi, kategori kedua memerlukan solusi ekonomi berupa penyediaan lapangan pekerjaan, dan kategori ketiga memerlukan

konsultasi psikologi. Belum terdengar rencana pemerintah untuk menangani tiga hal ini, terutama yang berkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan darurat.

KETIGA, derasnya arus keinginan angkatan kerja unskill untuk menjadi TKI didorong sejumlah alasan. Di antaranya karena menjadi TKI masih memberi harapan, pada saat yang sama di negeri sendiri tidak tersedia lapangan pekerjaan. Dalam kerangka ini, keseimbangan antara pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi/produksi (production-centered development) dan yang berpusat pada manusia (people-centered development) perlu diciptakan.

Pemberian porsi "over dosis" terhadap production-centered development oleh pemerintah di bawah kendali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada lima tahun ke depan dicemaskan Daoed Joesoef (Kompas, 27/10/ 2004). Menurut dia, jangan sampai pemerintah kembali terjebak paradigma lama, yang menempatkan sektor ekonomi sebagai panglima, dan menganggap pertumbuhan ekonomi bak "dewa". Bahwa pertumbuhan ekonomi itu penting, tentu benar. Namun selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, energi pemerintah juga harus dituang untuk pembangunan yang berpusat pada manusia. Toh dalam pemerintahan Orde Baru "dewa" itu terbukti gagal membuktikan asumsinya tentang trickle-down effect dan gagal kemakmuran merata bagi rakyat Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi disebut tidak berpusat pada manusia jika berciri jobless growth (UNDP, 1996), yakni pertumbuhan ekonomi tidak disertai terciptanya lapangan pekerjaan dan penyelesaian masalah pengangguran. Justru sebaliknya, desakan industrialisasi terhadap lapangan pekerjaan (displacement effect) terjadi melalui mekanisme pamarjinalan dunia usaha lokal-tradisional oleh industrialisasi berbasis kapital (ILO, 1977).

Misalnya, pendirian pabrik sandal di Afrika Barat dengan dua mesin injeksi menghasilkan 3,5 juta pasang sandal per tahun, mempekerjakan 40 orang, dalam waktu singkat menggeser 5.000 perajin sandal yang melibatkan 60.000 tenaga kerja. Industri tekstil modern Indonesia tahun 1970-an menyerap 86.000 tenaga kerja, namun pada saat sama 410.000 pekerja tekstil tradisional (penenun, penjahit, pencelup) kehilangan lapangan pekerjaan (Strahm, 1999). Karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengandalkan pertumbuhan ekonomi sebagai pilar tunggal dalam menciptakan lapangan pekerjaan, kemakmuran, dan pemerataan. Atas dasar inilah, menyeimbangkan production- centered development dan people-centered development harus sungguh-sungguh dilakukan.

KEEMPAT, pemulangan massal TKI ilegal dari Malaysia kali ini hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi kita, terutama bagi calo tenaga kerja, TKI sendiri, dan pemerintah. Harus disadari, ketika "jalan gelap" menjadi TKI ilegal dipilih, sebenarnya kita telah mempertaruhkan dua hal besar sekaligus. Pertama mempertaruhkan nasib dan keselamatan TKI ilegal sendiri, dan pada saat yang sama mempertaruhkan martabat bangsa.

Untuk direnungkan, apakah dua hal besar itu rela di-"barterkan" begitu saja dengan devisa? Jika "tidak", maka, pertama, praktik calo tenaga kerja yang ikut membidani lahirnya TKI ilegal harus diakhiri. Kedua, pemberian sanksi kepada calo dalam rangka "membasmi" praktik percaloan perlu jadi agenda bersama. Ketiga, calon TKI hendaknya lebih berhati- hati dalam memilih perantara tenaga kerja. Keempat, pemerintah perlu meningkatkan efektivitas komunikasi-informasi pada publik soal bahaya praktik calo dan prosedur yang benar bekerja di luar negeri. Penghentian "pentas drama" TKI ilegal tak boleh ditunda lagi agar tidak melahirkan babak berikut. Semua itu hanya mungkin terjadi jika seluruh "pemeran utama" mau menyadari, upaya mengais rezeki seharusnya seiring dengan upaya menjaga martabat bangsa.

ENY HARYATI Dosen FIA-Unitomo, Staf Ahli CLIENTS, Direktur Eksekutif Center for Integrated Community Learning and Empowerment (CIRCLE)

URL Source: <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0411/08/opini/1370055.htm>

